

Refleksi Siklus Konflik Antar Organisasi Keagamaan (NU & Muhammadiyah)

Ahmad Jaiz, Izwan Hafizi

Institut Agama Islam negeri Pontinak

Email: ahjaiza@gmail.com, IzwanHafizi1205@gmail.com

Abstract

The socio-religious conflict between Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah is a historical phenomenon within Indonesian society, particularly at the grassroots level. This conflict does not always manifest itself physically, but is reflected in clashing discourses, differences in religious practices, preaching methods, and even struggles for social and religious authority within society. This research aims to understand the patterns and cycles of conflict between NU and Muhammadiyah through a socio-religious analysis approach, exploring the historical roots, triggering factors, involved actors, and the mechanisms of conflict reproduction within the social sphere. The results indicate that the conflict is not linear but forms a cycle influenced by local social, political, and cultural conditions. Furthermore, the conflict cycle can transform into cooperation and harmony when there is space for dialogue, inclusive social interaction, and moderate policies that accommodate differences. This research is expected to provide a theoretical contribution to the understanding of religious conflict and offer a transformative peace perspective as an effort to reduce tensions between the two organizations.

Keywords: *socio-religious conflict, NU, Muhammadiyah, conflict cycle, peace transformation*

Abstrak

Konflik sosial keagamaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan fenomena yang secara historis terjadi dalam dinamika masyarakat Indonesia, terutama di tingkat akar rumput. Konflik ini tidak selalu muncul dalam bentuk fisik, tetapi tercermin dalam pertentangan wacana, perbedaan praktik ibadah, metode dakwah, hingga perebutan otoritas sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola dan siklus konflik antara NU dan Muhammadiyah melalui pendekatan analisis sosial keagamaan, dengan menelusuri akar historis, faktor pemicu, aktor-aktor yang terlibat, serta mekanisme reproduksi konflik dalam ruang sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak bersifat linear, tetapi membentuk suatu siklus yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya setempat. Selain itu, siklus konflik dapat bertransformasi menjadi kerja sama dan harmoni ketika terdapat ruang dialog, interaksi sosial inklusif, serta kebijakan moderasi yang mampu mengakomodasi perbedaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pemahaman konflik keagamaan serta menawarkan perspektif perdamaian transformatif sebagai upaya mereduksi ketegangan di antara kedua organisasi.

Kata kunci: konflik sosial keagamaan, NU, Muhammadiyah, siklus konflik, transformasi perdamaian

Pendahuluan

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konflik sering kali muncul bukan hanya karena faktor politik dan ekonomi, tetapi juga karena perbedaan pandangan keagamaan dan ideologi sosial. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Meskipun keduanya berlandaskan pada semangat Islam rahmatan lil ‘alamin, perbedaan dalam pendekatan teologis, metode dakwah, serta orientasi sosial dan politik kerap memunculkan gesekan di tingkat lokal. Dinamika hubungan antara NU dan Muhammadiyah menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan kedua organisasi ini mengalami pasang surut—dari kerja sama harmonis dalam kegiatan sosial dan pendidikan, hingga munculnya ketegangan yang bersumber dari perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan, pengelolaan lembaga pendidikan Islam, maupun keterlibatan dalam kegiatan politik lokal. Fenomena ini mencerminkan adanya siklus konflik kontemporer yang dapat berulang, terutama ketika komunikasi dan kesepahaman antar pihak melemah.

Kajian tentang siklus konflik ini menjadi penting untuk memahami bagaimana konflik antarorganisasi keagamaan terbentuk, dikelola, dan diselesaikan dalam konteks masyarakat multikultural. Melalui refleksi terhadap interaksi antara NU dan Muhammadiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola-pola konflik yang terjadi, faktor-faktor pemicunya, serta potensi resolusi yang dapat memperkuat kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada konflik itu sendiri, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi dinamika hubungan kedua organisasi. Pemahaman terhadap siklus konflik ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya membangun dialog keagamaan yang konstruktif dan memperkuat harmoni sosial masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena siklus konflik antara NU dan Muhammadiyah dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial, pola hubungan antarkelompok, serta makna yang terkandung dalam praktik keagamaan dan interaksi sosial kedua organisasi.

Hasil dan pembahasan

A. Selayang pandang kedua organisasi keagamaan

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Organisasi ini lahir di tengah situasi masyarakat Islam yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kolonialisme Belanda. K.H.Ahmad Dahlan terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam (reformisme) di Timur Tengah — seperti pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha—yang menekankan pentingnya ijtihad dan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam.¹ Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap sebagai bid‘ah, khurafat, dan takhayul, serta memajukan umat Islam melalui pendidikan modern dan kegiatan sosial. Di

¹ Haedar Nashir. Gerakan Islam Syiar dan Sosial Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, 2010.

bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum umum dan agama secara seimbang (seperti HIS Muhammadiyah, SMP, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah). Di bidang sosial dan kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga kesejahteraan. Di bidang dakwah, Muhammadiyah menekankan pendekatan rasional dan kontekstual terhadap ajaran Islam.²

Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah menjadi salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam politik kebangsaan dan pendidikan nasional. Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), Muhammadiyah berafiliasi dengan Partai Masyumi. Setelah masa Orde Baru, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan sosial-keagamaan non-partai, fokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial.³ Tokoh-tokoh penting seperti Prof. Dr. Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Haedar Nashir memperluas peran Muhammadiyah di ranah moderasi Islam, demokrasi, dan kebangsaan. Kini Muhammadiyah memiliki lebih dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial di seluruh Indonesia menjadikannya organisasi modernis Islam terbesar di Asia Tenggara.

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya, Jawa Timur, oleh sejumlah ulama pesantren yang dipelopori oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, bersama ulama seperti K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, dan lain-lain. NU lahir sebagai reaksi terhadap munculnya gerakan reformisme Islam yang dianggap terlalu puritan, serta sebagai upaya mempertahankan tradisi keislaman ala Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang telah berkembang di pesantren-pesantren Nusantara, juga atas dasar perintah tersirat Syaikhona kholil bangkalan selaku guru dari Kh. Hasyim Asy'ari.⁴ Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan. Peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah politik dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan. Para ulama umumnya telah memiliki jama'ah (komunitas warga yang menjadi kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan kyai santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pola hubungan santri-kyai ini mampu mewarnai bahkan membentuk sub kultural tradisional Islam tersendiri di Indonesia.⁵

B. Siklus Konflik

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing bergerak di bidang sosio-kultural kemasyarakatan, yang mempunyai minat dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam masing-masing ruang lingkup masyarakatnya dengan pendekatan yang berbeda. Masyarakat yang majemuk secara sosial keagamaan terbagi menjadi 2 kelompok yakni NU dan Muhammadiyah, agama yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat justru menjadi sumber konflik di masyarakat.

Konflik horizontal berbasikan issue keagamaan telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena diskriminasi atas nama agama sedemikian rupa telah menjejala di

² Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan siPenyantun, Diva Press: Yogyakarta, 2018.

³ Yudian Wahyudi. Maqashid Syariah dalam Muhammadiyah dan NU, UIN Sunan Kalijaga Press, 2010.

⁴ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2004.

⁵ Rozikin Daman, Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

banyak daerah, bahkan secara eksplosif muncul di beberapa Negara Timur Tengah akhir-akhir ini. Dalam pembahasan majalah Suara Muhammadiyah Edisi September 2013, konflik horizontal terkait dengan issue agama difahami sebagai salah satu ancaman paling serius dalam konteks harmoni sosial, dibandingkan dengan konflik horizontal lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa agama sejatinya mengajarkan tata harmoni masyarakat, perdamaian, cinta kasih namun dalam manifestasinya konflik sosial berbasis agama lebih sering hadir dalam wajah kekerasan. Bahkan lebih dari itu, konflik horizontal berbasis agama seringkali melibatkan pilar-pilar penjaga moral masyarakat, seperti tokoh agama dan institusi peribadatan, yang seharusnya para pemuka agama dan institusi keagamaan menjadi pilar dari harmoni sosial itu sendiri.

Issue konflik horizontal berbasis agama di Indonesia, mengalami dinamika yang sangat berarti, dari konflik horizontal lintas kelompok agama, seperti kasus di Poso, Ambon, Bali, sampai dengan issue konflik horizontal dalam satu kelompok agama, semisal dalam masyarakat Islam seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, Wahabi, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis. Konflik horizontal tersebut sampai dalam titik yang cukup mengkhawatirkan, di mana klaim-klaim kebenaran sepihak sampai menempatkan pihak lain sebagai kafir, halal darahnya.⁶ Studi tentang penyebab konflik antar organisasi keagamaan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia. Tesis Abdul Munir Mulkhan lebih bertutur bagaimana konflik yang terjadi antar masyarakat yang berafiliasi kepada organisasi keagamaan tertentu kemudian memilih afiliasi kultural bersama dalam bentuk kompromistik.⁷

Studi M Nur Hasan memberikan catatan penting tentang kompetisi aliran keagamaan tradisional, yang seringkali terlembagakan dalam struktur organisasi NU, dan aliran keagamaan modernis, yang terlembagakan dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Dua organisasi Islam yang menjadi mainstream aliran keagamaan di Indonesia menunjukkan dinamika hubungan yang sangat intensif, dari fase yang saling kompetisi ide, saling melakukan pendekatan satu sama lain, sampai dengan pilihan untuk menghargai satu sama lain. Pada tingkat hubungan yang diametral, hubungan NU dan Muhammadiyah tidak harmonis terkait dengan interpretasi issue pokok Islam dalam hal peribadatan. Pada tingkat hubungan yang harmonis, terkait dengan posisi NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi sipil yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral dan harmoni masyarakat Indonesia.⁸

Kerukunan intern umat Islam di Indonesia, seperti juga pada umat-umat beragama lainnya, sering terganggu oleh riak-riak konflik intern, baik karena hal-hal yang bersifat doktriner maupun karena sebab-sebab lain diluar itu. Apalagi, umat Islam di Indonesia sebagian besar sudah lama berada dalam kotak-kotak organisasi yang membawa dan mengajarkan paham-paham keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, al-Irsyad dan lain sebagainya.

Sebagai dua organisasi keagamaan terbesar, keberadaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam sejarah Indonesia modern memang amat menarik. Sepanjang perjalanan kedua organisasi Islam terbesar ini, senantiasa diwarnai kooperasi, kompetisi, sekaligus konfrontasi atau konflik. Apalagi selama ini, NU dikenal sebagai organisasi Islam tradisional dan konservatif

⁶ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan "Civil Society"*, Yogyakarta, Manhaj, 2009.

⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Aksara, 2000.

⁸ Sjamsudduha, *Konflik & Rekonsiliasi NU Muhammadiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.

yang berbasis masyarakat desa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang modernis-substansialis yang berbasis masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.⁹ Tak dapat dipungkiri, hubungan Muhammadiyah dan NU pernah diwarnai dengan konflik yang dipicu oleh perbedaan cara pandang keagamaan, meskipun sebenarnya tidak begitu prinsipil dan berada pada wilayah yang mudah diperdebatkan (khilafiyah) seperti penggunaan qunut dalam salat subuh, jumlah rekaat shalat tarawih, ritus yang berkaitan dengan kematian, dan penentuan idul fitri. Karena tidak begitu prinsipel, seharusnya konflik bisa dinetralisir. Tapi yang terjadi malah konflik berkembang dalam radius yang luas dan melibatkan banyak segmen masyarakat.¹⁰

Disamping terjadi pada wilayah keagamaan, konflik antara Muhammadiyah-NU acap kali terjadi dalam wilayah politik. Ada dua jenis wilayah politik yang potensial memunculkan konflik. Pertama di parpol, sedangkan yang kedua di pemerintahan, yaitu di Departemen Agama. Dalam wilayah pertama, sebenarnya antara Muhammadiyah dan NU pernah memperlihatkan ikatan ukhuwah yang menggembirakan ketika bersatu dalam Masyumi. Namun ukhuwah dalam politik tidak dapat berlangsung lama karena NU keluar dari Masyumi yang konon disebabkan oleh kekecewaan NU terhadap dominasi kubu modernisme yang disokong Muhammadiyah.¹¹ Konflik politik antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais disadari atau tidak mengancam keharmonisan hubungan NU-Muhammadiyah. Siapapun boleh mengatakan bahwa aktivitas politik kedua tokoh ini tidak ada kaitannya dengan NU dan Muhammadiyah. Sehingga pertentangan antara Gus Dur dan Amien Rais tidak berarti pertentangan antara NU dan Muhammadiyah. Hanya saja kita harus melihat bahwa paternalisme masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Masyarakat kita masih sangat “tergantung” kepada pemimpinnya. Secara psikologis umat tidak akan dapat begitu saja mengabaikan keduanya sebagai mantan pucuk pimpinan NU dan Muhammadiyah. Kharisma keduanya di mata pengikutnya menyebabkan keduanya masih dianggap sebagai pemimpin informal bagi kelompoknya.

Terjadilah kemudian tragedi-tragedi semisal penyilangan rumah-rumah warga Muhammadiyah di Banyuwangi dan beberapa tempat di Jawa Timur, perusakan fasilitas dan amal usaha Muhammadiyah, dan tindakan-tindakan destruktif lain yang mengancam hubungan dua ormas bersaudara ini. Penyebabnya jelas, lantaran massa grass root menurunkan konflik elit ke dataran yang massif yang lebih rendah. Secara psikologis, konflik politik antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dianggap sebagai konflik antara NU dan Muhammadiyah. Coser dalam teori fungsional konfliknya memadukan dua teori, yaitu teori fungsional struktural versus teori konflik. Alasan Coser, kedua teori ini mengandung kebenaran tetapi tidak mampu menjelaskan kenyataan sosial secara menyeluruh, karena nyatanya masyarakat itu sesekali terlibat konflik, tetapi sesekali juga terlibat kesepakatan-kesepakatan.¹² Hal ini pula yang terjadi dalam hubungan antara Muhammadiyah dan NU di Indonesia. Konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dan NU tidak terjadi terus menerus, dan tidak pula secara serempak terjadi di mana-mana, melainkan

⁹ Muttoharun Jinan, *Arus Balik Aktivitas NU dan Muhammadiyah*, dalam “Muhammadiyah-NU Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan”, Malang: UMM Press, 2004.

¹⁰ Depag RI, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Depag RI, 2003.

¹¹ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik, Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2000.

¹² Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: University Muhammadiyah Press, 2003.

secara sporadis. Hubungan antara Muhammadiyah dan NU tidak selalu harmonis, kadang bermesraan, kadang pula terjadi konflik.¹³ Jika dipolakan hubungan antara Muhammadiyah dan NU dapat dibagi dalam tiga pola hubungan, yakni 1) konfrontatif teologis 1912-1985, 2) Harmonis semu, 1986-2000, 3) konfrontatif politik, 2000-2001. Setelah tahun 2001 sampai sekarang hubungan antara Muhammadiyah dan NU cenderung harmonis.

Kesimpulan

Hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, mencakup fase kooperasi, kompetisi, hingga konflik. Secara historis, perbedaan mendasar antara keduanya berakar pada pendekatan keagamaan dan sosial-budaya, NU bersifat tradisional dan berbasis masyarakat pedesaan, sedangkan Muhammadiyah bersifat modernis dan lebih banyak berkembang di kalangan masyarakat perkotaan. Konflik antara NU dan Muhammadiyah tidak hanya terjadi pada tataran teologis dan ritual keagamaan seperti qunut, jumlah rakaat tarawih, atau penentuan Idul Fitri, tetapi juga merambah ke wilayah politik dan sosial, terutama ketika tokoh-tokoh utama dari kedua organisasi terlibat dalam dinamika politik nasional. Konflik di tingkat elite sering kali menurun menjadi ketegangan sosial di tingkat akar rumput, yang memperburuk hubungan antar anggota masyarakat. Namun demikian, dinamika ini tidak bersifat permanen.

Berdasarkan teori fungsional-konflik Lewis Coser, konflik dapat berfungsi secara positif dalam memperkuat integrasi sosial jika dikelola dengan baik. Hubungan NU dan Muhammadiyah pun mengalami siklus fluktuatif, dari fase konfrontatif teologis (1912–1985), harmoni semu (1986–2000), hingga konfrontatif politik (2000–2001). Setelah tahun 2001, hubungan keduanya cenderung menuju arah kooperatif dan harmonis, terutama dalam menghadapi isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan demikian, konflik antara NU dan Muhammadiyah lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses dialektika sosial-keagamaan yang mencerminkan perbedaan cara pandang dan strategi dakwah, bukan sebagai pertentangan ideologis yang permanen. Dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia, sinergi antara keduanya justru berpotensi menjadi kekuatan besar dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai keagamaan, dan memperkokoh persatuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Haedar Nashir. Gerakan Islam Syiar dan Sosial Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, 2010.
- Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan siPenyantun, Diva Press: Yogyakarta, 2018.
- Yudian Wahyudi. Maqashid Syariah dalam Muhammadiyah dan NU, UIN SunanKalijaga Press, 2010.
- Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2004.
- Rozikin Daman, Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah, Yogyakarta:Gama Media, 2001.
- M. Nur Hasan, Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan “Civil Society”, Yogyakarta, Manhaj, 2009.

¹³ Argyo Demartoto,, Strukturalisme Konflik : Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser Dan Ralf Dahrendorf, dalam Jurnal Dilema Sosiologi, Vol 24 No. 1 Tahun 2010.

Ahmad Jaiz, Izwan Hafizi

Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Aksara, 2000.

Sjamsudduha, *Konflik & Rekonsiliasi NU Muhammadiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.

Muttoharun Jinan, *Arus Balik Aktivitas NU dan Muhammadiyah, dalam "Muhammadiyah-NU Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan"*, Malang: UMM Press, 2004.

Depag RI, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Depag RI, 2003.

Maswadi Rauf, *Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2000.

Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: University Muhammadiyah Press, 2003.

Argyo Demartoto, *Strukturalisme Konflik : Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser Dan Ralf Dahrendorf*, dalam *Jurnal Dilema Sosiologi*, Vol 24 No. 1 Tahun 2010.